

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan berbagai penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan guna mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Sesuai dengan penelitian terdahulu tentang hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini:

##### 1. Rita Dwi Putri (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, presentase komisiaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah corporate governance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, persentase komisiaris independen berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Terdapat kesamaan variabel independen yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu variabel kepemilikan institusional dan komite audit.
- b. Kesamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan data yang sudah ada atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dengan kriteria sampel dalam penelitian ini perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- d. Topik Penelitian sekarang dan terdahulu berkaitan dengan penghindaran pajak.

Terdapat pula perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu, terdapat variabel kualitas audit dan konservatisme akuntansi yang tidak digunakan pada penelitian sekarang.

## **2. Rini Handayani (2018)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indikator laporan keuangan tentang penghindaran pajak. Pengembalian asset (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan digunakan sebagai indikator dalam laporan keuangan yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan *Company Size*. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterokedasitas,

uji multikolinearitas, uji regresi linear berganda, koefisien determinasi , uji parsial , dan uji simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)*, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh parsial terhadap penghindaran pajak. Namun secara bersamaan ada pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Persamaan lain yaitu terletak pada penggunaan sampel, yang diambil dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang tidak menggunakan *leverage* sebagai variabel independen.

### **3. Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprapti, Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris *Corporate social Responsibility (CSR)*, untuk menghindari pajak berdasarkan gender sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Coporate Responsibility Social (CSR)* dan gender sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *go public* sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan TSP memberikan efek negatif total penghindaran. Jenis kelamin (proporsi wanita dalam dewan perusahaan) telah memperkuat efek pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada praktik penghindaran pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan variabel *corporate social responsibility* sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang terdapat variabel moderasi yaitu gender yang tidak digunakan pada penelitian sekarang. Serta sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan *go publik* sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **4. Rahmawati Hanny dan Nanik Niandri (2018)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji koneksi politik, karakteristik perusahaan dan kualitas audit pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu koneksi politik, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa keuangan perusahaan yang diaudit yang terdaftar di ISE. Dalam melakukan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya koneksi politik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage*, karakteristik perusahaan, dan juga kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel bebas. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu koneksi politik, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit. Serta sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan data sekunder berupa keuangan perusahaan yang diaudit yang terdaftar di ISE.

#### **5. Arie Pratama (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam penghindaran pajak perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Ukuran, Usia perusahaan, *Leverage*, Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Penggunaan Perusahaan, Komite Audit. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih termasuk perusahaan yang terdaftar selama lima tahun berturut-turut dan tidak termasuk perusahaan keuangan dan pertambangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa karakteristik perusahaan, yaitu usia, laba dan ukuran, secara signifikan mempengaruhi praktik-praktik penghindaran pajak. Beberapa proksi *corporate governance*, firma audit, kualitas audit dan ukuran dewan komisaris, juga ditemukan mempengaruhi penghindaran pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta menggunakan profitabilitas,

ukuran perusahaan, dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel independen. Perbedaannya pada penelitian saat ini tidak menggunakan variabel leverage, penggunaan perusahaan, proporsi komisaris independen, dan usia perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu diambil dari perusahaan pertambangan dan keuangan.

#### **6. Dedy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan perbankan *go public listing* di Bursa Efek. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, *leverage* dan profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang *go public*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian dari uji keenam variabel independen, variabel dengan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Dan lima variabel tidak mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Persamaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Menggunakan sampel pada perusahaan

perbankan yang go public dan metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada penelitian sekarang tidak menggunakan leverage sebagai variabel independen.

#### **7. Yudha Aryo Sudibyo (2016)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti hubungan antara koneksi politik dan perilaku penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu Koneksi Politik (POL), Non-Koneksi Politik (NOPOL) sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan sampel yaitu sampel dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk menguji dampak perusahaan milik negara terhadap perilaku penghindaran pajak, teknik analisis yang digunakan menggunakan regresi *Ordinary least square* (OLS) dalam pengujian penelitian ini. Dan hasilnya pada perusahaan yang mempekerjakan komisioner independen yang terhubung secara politik dalam penelitian, ini lebih cenderung menunjukkan perilaku penghindaran pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dan terdahulu yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan koneksi politik sebagai variabel terikat.

#### **8. Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Responsibility Social* (CSR), profitabilitas, dan komisaris independen

terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Corporate Responsibility Social* (CSR), profitabilitas, leverage, komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel yang diambil dari beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan hanya dua hipotesis yang diterima, sedangkan dua hipotesis lainnya ditolak. Variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu:

- a. Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
- b. Pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan variabel komisiaris independen atau dewan komisiaris dan profitabilitas (*ROA*).
- c. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan variabel CSR, dan leverage sebagai variabel independen.

## **9. Vivi Andeyani Tandean (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap *tax*

*avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan independensi auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel dari delapan puluh empat perusahaan manufaktur. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada tidak digunakannya variabel independensia auditor sebagai variabel independen dan teknik pengambilan sampel menggunakan *judgment sampling*.

#### **10. Tresno Eko Jaya, M. Yasser Arafat, dan Dinda Kartika (2012)**

Tujuan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme tata kelola perusahaan dan prinsip konservatisme akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan empat puluh sembilan sampel data yang diambil dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis logistik biner dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance*, diukur dengan komposisi kepemilikan, ukuran dewan, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada kesamaan variabel independen yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi. Kesamaan Pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada atau digunakan oleh pihak lain. Dan kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis dalam menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen serta topik penelitian sekarang dan terdahulu berkaitan dengan penghindaran pajak. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu

Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel pada perusahaan perbankan dan Pada penelitian terdahulu, terdapat variabel kualitas audit dan konservatisme akuntansi yang tidak digunakan pada penelitian sekarang.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian**

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Independen				
		Komit e Audit	Kepemilika n Institusional	Dewan Komisaris	Ukuran Perusahaan (Size)	Profitabilitas (ROA)
Rini Handayani	2018				S	S
Rita Dwi Putri	2018	TS	TS	S		
Arie Pratama	2017					
Dedy Dias Cahyono,Rita Andini dan Karis Raharjo	2016	TS	S	TS	TS	TS
Dyah Ayu Pradipta dan Supriyadi	2015			TS		S
Vivi Andeyani Tandean	2014	S	TS		TS	
Tresno Eko Jaya, M.Yasser Arafat, Dinda Kartika	2012		TS			

Sumber: Diolah

Keterangan:

TS : Tidak Signifikan

S : Signifikan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam rangka memahami pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisiaris, ukuran perusahaan (*size*), dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan, maka digunakan teori keagenan (*Agency Theory*). Scott (2015:385) menjelaskan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari desain kontrak dalam memotivasi agen dalam bertindak maupun bekerja keras atas nama prinsipal. Namun akan terjadi suatu konflik jika kepentingan agen bertolak belakang dengan prinsipal. Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut. *Agency Theory* atau teori keagenan juga dapat dihubungkan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berarti orang di institusi juga mempunyai saham. Seperti seorang manajer yang bertugas sebagai pemimpin dalam perusahaan tetapi dia juga mempunyai kepemilikan saham.

Hubungan *teori agency* dengan kepemilikan institusional terletak pada seorang manajer yang mempunyai perusahaan dan dia terlibat secara langsung untuk mengelola perusahaan. Jadi benturan kepentingan antara kedua pihak akan semakin sedikit karena di satu sisi manajer sebagai pemilik perusahaan yang memberikan tanggung jawab ke pelaksana, tetapi di sisi lain manajer juga sebagai pelaksana yang turun langsung ikut serta dalam mengelola perusahaan, maka benturan kedua kepentingan semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa *agency theory* itu suatu benturan kepentingan antara dua pihak yang kepentingannya berbeda, yang satu dituntut untuk dikelola dengan baik dan yang satunya dapat terlihat baik dan dia menghalalkan segala cara agar kelihatan baik dan sehingga benturan kepentingan itu memunculkan hubungan antara kepemilikan institusional dengan teori keagenan.

### **2.2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha pengurangan beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan, misalnya memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan C.A. 2013:23). Selain itu, menurut Michelle Hanlon (2010) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu sebagai pengurang pajak eksplisit pada laba sebelum pajak atau laporan arus kas perusahaan atau merefleksikan transaksi yang memiliki efek terhadap pengurangan pajak perusahaan dengan dibantu pengukuran *book tax gap*. Sebagai seorang warga negara yang terikat peraturan dan hukum suatu Negara seseorang mau tidak mau harus mematuhi hukum dan peraturan yang ada agar hidup dengan baik dan tenteram. Salah satu aturan yang hampir pasti ada di setiap negara adalah

aturan mengenai kewajiban membayar pajak bagi warga negara yang menjadi wajib pajak. Suandy (2008:7) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

### **2.2.3. Komite Audit**

Komite audit menurut Arens at al (2010), menjelaskan bahwa umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuk komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian dan efektifitas pelaksanaan auditor eksternal dan internal. Badan pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal dan fungsi audit eksternal
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

#### **2.2.4. Kepemilikan institusional**

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Menurut Nabela (2012:12) kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Jadi dengan kata lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan menggunakan persentase dan dihitung pada akhir tahun.

#### **2.2.5. Dewan Komisaris**

Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Menurut Ujiyanto

(2007) proporsi dewan komisaris dapat dihitung dengan cara menghitung persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran dewan komisaris perusahaan sampel.

### 2.2.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu penerapan yang dapat menunjukkan sebuah kondisi perusahaan yang mana terdapat beberapa parameter yang bisa digunakan dalam menentukan seberapa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang berada pada peningkatan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan dari sumber daya perusahaan yang semakin besar. Namun sebaliknya jika perusahaan yang peningkatan penjualannya rendah maka membutuhkan dukungan dari sumber daya yang semakin kecil. Menurut Wiwin dan Dani (2017) ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan besar dan perusahaan kecil.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \frac{\text{Total Aset} - \text{Total Aset}_{t-1}}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

### 2.2.7. Profitabilitas

Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas menggambarkan keberhasilan operasional perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan asetnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas

suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir 2014:33). Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. Menurut I Made Sudana (2011:22), berikut adalah cara untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan.

1. *Return On Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

## 2. *Return On Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Equity}}$$

## 3. *Profit Margin Ratio*

*Profit margin ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. *Profit margin ratio* dibedakan menjadi:

### a. *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Net Sales}}$$

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. OPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Sales}}$$

c. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}}$$

4. *Basic Earning Power*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Salah satu metode pengukuran profitabilitas yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA). Dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia dalam perusahaan.

#### **2.2.8. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

Peran komite audit yaitu memberikan nasihat tentang masalah keuangan dan audit serta juga untuk menyediakan mekanisme pengawasan umum atas nama dewan direksi. Komite audit berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit (BAPEPAMLK, 2012). Komite audit juga bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Hasil penelitian Vivi Andeyani Tandean (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga sulit untuk dilakukannya penghindaran pajak.

### **2.2.9. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Theserani, 2016). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*), karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan atau penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Semakin kuat kendali yang

dilakukan pemilik institusional, maka semakin mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak.

#### **2.2.10. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

Dewan komisaris merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari masalah konflik keagenan. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya dewan komisaris akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa dewan komisiaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak. Komisaris independen telah melakukan pengawasan dapat melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.

#### **2.2.11. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan

dan jumlah penjualan. Suatu perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Semakin besar laba maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi.

#### **2.2.12. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)**

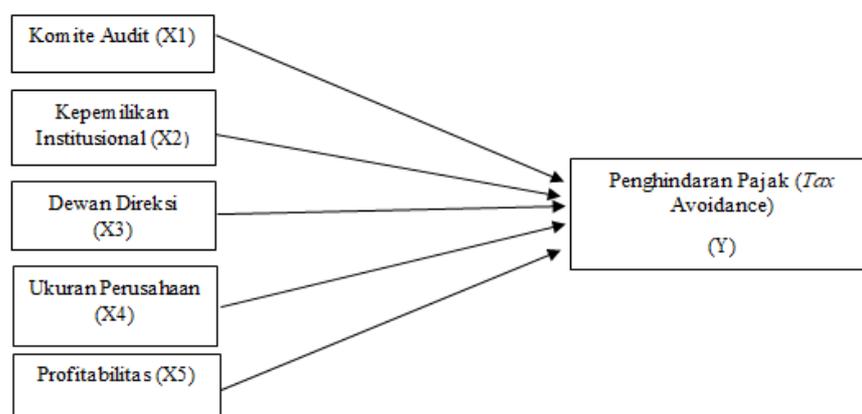
ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas perusahaan meningkat maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi return on asset maka semakin besar laba yang di diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba

perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang di bebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan antar variable, maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut;



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel independen penelitian adalah komite audit, kepemilikan institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan disertai dengan landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> :Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan
- H<sub>2</sub> :Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>3</sub> :Dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>4</sub> :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>5</sub> :Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

